

## Dinamika Produktivitas Padi, Harga Eceran Beras (HEB), dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta Korelasi antara HPP dan HEB

### (Rice Productivity Dynamics, Retail Price of Rice (HEB), Government Purchase Price (HPP), and the Correlation between HPP and HEB)

Tinjung Mary Prihanti\*, Maria Pangestika

(Diterima Agustus 2016/Disetujui November 2019)

#### ABSTRAK

Beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pemerintah menetapkan HPP (harga pembelian pemerintah) untuk memicu peningkatan produktivitas padi di negara ini serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika produktivitas padi, dinamika harga pembelian pemerintah (HPP), dan harga eceran beras (HEB), serta untuk menganalisis hubungan antara HPP gabah dan HEB di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif yang meliputi penghitungan pertumbuhan produktivitas, koefisien variasi, dan analisis korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama tahun 2010–2014, produksi beras cenderung berfluktuasi, sementara HPP dan HEB cenderung meningkat setiap tahun, dan disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif dalam taraf sedang antara HPP gabah dan HEB di Pulau Jawa.

**Kata kunci:** beras, harga eceran beras, harga pembelian pemerintah, produktivitas, Pulau Jawa

#### ABSTRACT

Rice is the staple food for most of the population of Indonesia. The government set the HPP (government purchasing price) to trigger the increased productivity of rice in the country as well as to improve the welfare/income of farmers. This study aimed to analyze the dynamics of rice productivity, the dynamics of HPP and HEB (retail price of rice), and to analyze the correlation between the productivity of rice, HPP of grain, and HEB in Java in the period of 2010–2014. The analysis showed that in 2010–2014, rice production tended to fluctuate, while the HPP and HEB tended to increase every year, but it is known that there is a correlation between the HPP of grain and HEB in Java.

**Keywords:** productivity, rice, government purchasing price, retail price of rice, Java Island

#### PENDAHULUAN

Beras merupakan makanan pokok bagi hampir semua penduduk Indonesia, di mana konsumsinya semakin meningkat tiap tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Kebutuhan beras yang besar ini tidak sejalan dengan produksi padi yang cenderung berfluktuasi. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut pemerintah masih mengandalkan produksi padi dari Pulau Jawa, karena tanah yang lebih subur, jaringan irigasi yang lebih tersedia, dan teknologi yang lebih maju sehingga Pulau Jawa memiliki peran penting dalam produksi padi nasional. Pada Tabel 1 disajikan data bahwa sumbangan Pulau Jawa dalam produksi padi lebih tinggi daripada luar Pulau Jawa dan produksi padi selama kurun waktu tersebut tidak pernah mengalami penurunan.

Upaya peningkatan produktivitas padi selain untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk Indonesia juga

untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraan petani mengingat sebagian besar petani mengusahakan tanaman padi. Akan tetapi, pada kenyataannya peningkatan produktivitas padi belum mampu meningkatkan pendapatan (kesejahteraan) petani. Hal ini karena, terjadinya fluktuasi harga jual, khususnya pada saat panen raya, ketika harga jual gabah dan beras menurun.

Beras sebagai komoditas strategis sangat sarat dengan campur tangan pemerintah, antara lain kebijakan pemerintah terkait aspek produksi, distribusi, perdagangan internasional, maupun kebijakan harga. Kebijakan harga berupa harga pembelian atau harga dasar dan harga eceran merupakan dua bentuk intervensi pemerintah terhadap harga yang memiliki implikasi langsung dan tidak langsung pada kesejahteraan petani.

Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras merupakan upaya pemerintah untuk memberikan insentif bagi petani padi untuk mengatasi rendahnya harga jual di tingkat petani, dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan (*price market clearing*) terutama pada saat panen raya. Melalui kebijakan HPP diharapkan

Tabel 1 Luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa

Uraian	Tahun					Rerata pertumbuhan
	2010	2011	2012	2013	2014	
Luas panen (ha)						
- Pulau Jawa	6358,00	6165,00	6186,00	6467,00	6000,00	0,20
- Luar Pulau Jawa	6895,00	7038,00	7260,00	7368,00	7393,00	1,76
Produksi (juta ton)						
- Pulau Jawa	36375,00	34405,00	36527,00	37493,00	36659,00	0,29
- Luar Pulau Jawa	30094,00	31352,00	32529,00	33787,00	34173,00	3,24
Produktivitas (kuintal/ha)						
- Pulau Jawa	57,21	55,81	59,05	57,98	57,28	0,08
- Luar Pulau Jawa	43,65	44,54	44,81	45,85	46,22	1,45

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian pada tahun 2015–2019.

Keterangan: Data ASEM pada tahun 2014 dan kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG).

produksi padi dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, stabilitas harga padi, dan peningkatan pendapatan petani (Sawit 2010). Intervensi pemerintah menstabilkan harga gabah dan beras bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran gabah dan beras sekaligus meningkatkan kapasitas produksi padi dalam negeri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong perekonomian perdesaan (Djojohadikusumo 1991).

Maulana (2012) menyatakan bahwa melalui kebijakan HPP maka multikualitas pada gabah diperkirakan mampu meningkatkan produksi gabah dengan kualitas yang lebih baik, keuntungan usaha tani melalui peningkatan produktivitas, dan adanya insentif bagi petani untuk meningkatkan kualitas gabah dan beras dari kualitas medium ke premium, dan kebijakan HPP multikualitas pada beras diyakini mampu mendorong pedagang atau industri penggilingan padi untuk meningkatkan produksi beras berkualitas.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan HPP untuk beras dan gabah sejak tahun 2001 (mulai berlaku sejak Januari 2002). Sejak saat itu sampai tahun 2014 sudah terjadi delapan kali perubahan HPP beras. Melalui Inpres No. 5 pada tahun 2015 harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25% dan kadar hampa maksimum 10% adalah sebesar Rp3700/kg di tingkat petani atau Rp3750/kg di tingkat penggilingan. Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minimum 14% dan kotoran maksimum 3% adalah sebesar Rp4600/kg di tingkat penggilingan atau Rp4650/kg di tingkat gudang Bulog.

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan HPP secara berkala untuk mengimbangi kenaikan harga input dan inflasi. Perubahan harga beras tidak terjadi setiap tahun, tetapi dapat dua tahun atau bahkan tiga tahun, bergantung pada kondisi yang dihadapi terkait dengan antisipasi gejolak harga beras ataupun penyediaan insentif berproduksi bagi petani. Formula penetapan harga dasar dan HPP berbeda-beda antar-waktu, namun hakikat tujuannya masih sama, yaitu untuk melindungi petani dari kejatuhan harga pada saat panen raya. Faktor yang memengaruhi kebijakan harga komoditas padi dan beras antara lain adalah penetapan HPP tidak merujuk pada harga beras internasional, tetapi sepenuhnya ditentukan

oleh ongkos produksi (Maulana 2012). Menurut Hermanto & Saptana (2017), kebijakan harga dipengaruhi oleh waktu panen karena waktu panen memengaruhi pasokan dan kualitas gabah.

Penetapan HPP diharapkan mampu membantu petani dan memenuhi kebutuhan beras bagi seluruh penduduk Indonesia, namun HPP yang ditetapkan justru memengaruhi harga beras di pasaran. HPP yang meningkat membawa harapan bagi petani untuk dapat menjual hasil panennya dengan harga yang tinggi sehingga pedagang membayar lebih mahal gabah atau beras yang diproduksi petani dan selanjutnya menyebabkan harga beras di pasar meningkat.

Kebijakan harga lain yang juga diterapkan di Indonesia adalah Harga Eceran Beras (HEB), yakni upaya pemerintah untuk menjaga agar stabilitas harga beras di pasar domestik tidak terlalu tinggi karena akan menekan daya beli masyarakat dan akhirnya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Pengendalian harga eceran beras biasanya dilakukan pada saat produksi padi mengalami penurunan sehingga memengaruhi penurunan penawaran padi di tingkat pasar dan mendorong peningkatan harga beras.

Ketidakstabilan harga memberikan efek pada keputusan produksi secara empiris yang telah dipelajari oleh Behrman (1968) dan Just (1974). Teori perilaku petani dalam penghindaran risiko (*risk aversion*) merupakan kata kunci dalam analisis dampak ketidakstabilan harga pada penawaran pertanian. Arisoy & Bayramoglu (2017) menyatakan bahwa perubahan besar dalam harga produk pertanian dari tahun ke tahun memengaruhi persediaan produk dan keputusan produsen dalam produksi. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan model Kyock dan Cobweb menyimpulkan adanya hubungan antara produksi dan harga.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebijakan HPP di Indonesia belum efektif bagi petani (Saputra *et al.* 2014), namun penerapan kebijakan HPP yang disertai dengan kebijakan pendukungnya berdampak positif pada stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen (Suryana *et al.* 2014). Menurut Siswanto *et al.* (2018), kebijakan jaminan harga berupa peningkatan HPP lebih efektif memengaruhi HEB beras dibandingkan dengan peningkatan penawaran beras, namun jika kebijakan jaminan harga berupa HPP diterapkan bersamaan dengan kebijakan subsidi

input akan memberikan dukungan bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

Melihat fenomena di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika produktivitas padi serta dinamika harga pembelian gabah oleh pemerintah HPP dan HEB di pasar tradisional serta menganalisis korelasi antara HPP gabah dan HEB di pasar tradisional di Pulau Jawa.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS statistik perdagangan pada tahun 2010–2014. Data yang diambil meliputi produktivitas padi, HPP gabah di tingkat petani, dan HEB di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014. Teknik analisis dijelaskan sebagai berikut:

#### Pertumbuhan Produktivitas

Pertumbuhan produktivitas diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Produktivitas akhir} - \text{produktivitas awal}}{\text{produktivitas awal}} \times 100\%$$

#### Koefisien Variasi

Koefisien variasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$$

Keterangan:

CV = Koefisien variasi

$\sigma$  = Standar deviasi

$\bar{x}$  = Nilai rata-rata

#### Korelasi

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara HPP dan HEB. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih.

Hubungan antara dua variable yang berkorelasi tersebut tidak harus terdapat hubungan kausalitas (*correlation does not imply causation*) (Usman 2009). Rumus koefisien korelasi Pearson adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{[\sum x^2 - (\sum x)^2][\sum y^2 - (\sum y)^2]}$$

Keterangan:

y = Variabel terikat

x = Variabel bebas

n = Jumlah responden

Hipotesis:

Ho = Tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel HPP dan HEB,

Ha = Terdapat hubungan signifikan antara variabel HPP dan HEB.

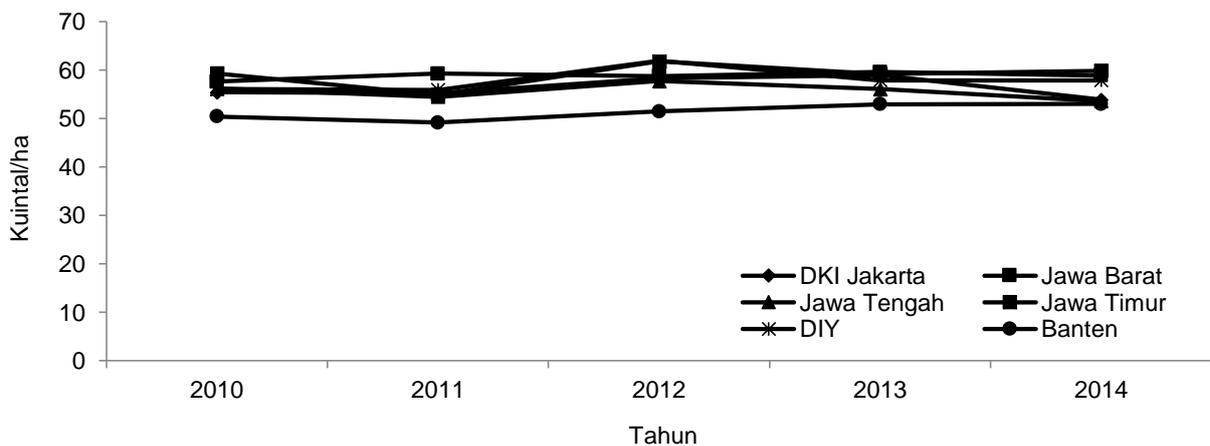
Korelasi linear sempurna dicapai ketika  $r = \pm 1$ , dan  $r = 0$  menyatakan bahwa x dan y cenderung tidak memiliki hubungan linear.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Dinamika Produktivitas Padi

Produktivitas merupakan salah satu ukuran kinerja usaha tani. Setiap kurun waktu tertentu pemerintah selalu mengukur tingkat produktivitas komoditas padi karena mencerminkan keberhasilan capaian usaha tani. Pulau Jawa masih diandalkan menjadi pemasok beras terbesar di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran pola fluktuasi produktivitas padi di semua provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan bahwa setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi produktivitas padi selama periode tahun 2010–2014. Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan produktivitas padi di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014 yang juga berfluktuasi sejalan dengan terjadinya fluktuasi



Sumber: Statistik perdagangan pada tahun 2010–2014.  
Gambar 1 Fluktuasi produktivitas padi di Pulau Jawa.

produktivitas padi pada masing-masing provinsi. Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata pertumbuhan produktivitas padi yang cenderung menurun pada tahun 2010–2014, yaitu sebesar -0,57%, bahkan pada tahun 2013–2014 terjadi penurunan sebesar -8,53%. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kecenderungan penurunan pertumbuhan produktivitas padi pada tahun 2010–2014 dengan rata-rata sebesar -1,08%. Nilai rerata pertumbuhan yang terendah terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, yaitu sebesar 0,49 dan 0,54%.

Berdasarkan Tabel 2, pada tahun 2010–2011 semua provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan produktivitas, kecuali Provinsi Jawa Barat, di mana iklim yang ekstrem merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada penurunan produktivitas tersebut. Secara rata-rata, pada tahun 2013–2014 merupakan periode ketika terjadi penurunan pertumbuhan produktivitas tertinggi pada enam provinsi di Pulau Jawa. Menurut BPS (2012) bahwa pada tahun 2011 produksi padi menurun sebanyak 712 ribu ton atau sebesar 1,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan luas panen sebesar 0,38% dan penurunan produktivitas sebesar 0,70%. Menurut Suryana *et al.* (2014) tahun 2011 terjadi iklim ekstrim sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah antisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan produktivitas padi di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014 adalah sebesar 0,28%, yang dapat dikatakan relatif rendah dibandingkan dengan peningkatan produktivitas padi di Indonesia pada tahun 2007–2009 sebesar 5,57%. Khususnya di Provinsi DIY, pada tahun 2013 terjadi

penurunan produksi padi yang cukup besar, terutama terjadi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo (BPS Provinsi DIY 2013).

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan produktivitas padi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014 adalah sebesar 0,28%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang mencapai angka sebesar 1,63% (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2015). Tabel 3 menunjukkan data produktivitas dan koefisien variasi produktivitas padi di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014. Dari data tersebut diketahui bahwa produktivitas padi tertinggi dicapai oleh wilayah yang berbeda. Provinsi di Pulau Jawa dengan rata-rata tingkat produktivitas padi paling tinggi pada tahun 2010–2014 adalah Jawa Timur, yaitu sebesar 5898 kg/ha dan produktivitas terendah adalah Provinsi Banten, yaitu sebesar 5136 kg/ha. Capaian produktivitas antar-provinsi di Pulau Jawa tidak terlalu berbeda. Pada tahun 2011, Provinsi Jawa Timur mencatat produktivitas terendah, di mana menurut Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (2011) secara kumulatif di Jawa Timur terjadi serangan hama dan penyakit paling luas, yaitu 192.858 ha di antara provinsi penghasil padi. Hama dan penyakit utama (hama tikus, wereng batang cokelat, penggerek batang, penyakit hawar daun bakteri, tungro, dan blas) selalu dijumpai pada usaha tani padi di Jawa Timur. Penyakit hawar daun bakteri dominan ditemukan di 27 kabupaten, yang mencapai sebesar 93% dari jumlah kabupaten lokasi usaha tani padi di Jawa Timur. Pada tahun 2013 penurunan itu terjadi berkaitan dengan penurunan produktivitas padi, di mana berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013

Tabel 2 Pertumbuhan produktivitas padi di Pulau Jawa

Provinsi	Pertumbuhan kurun tahun				Rata-rata (%)
	2010–2011 (%)	2011–2012 (%)	2012–2013 (%)	2013–2014 (%)	
DKI Jakarta	-0,31	5,41	1,13	-8,53	-0,57
Jawa Barat	2,81	-0,81	1,34	-1,19	0,54
Jawa Tengah	-2,96	5,93	-2,84	-4,44	-1,08
Jawa Timur	-7,42	12,48	-4,20	1,12	0,49
DI Yogyakarta	-0,23	10,72	-6,46	-0,02	1,00
Banten	-2,54	4,76	2,86	0,06	1,28
Rata-rata	-1,77	6,42	-1,36	-2,17	0,28

Sumber: Statistik perdagangan pada tahun 2010–2014.

Tabel 3 Produktivitas dan koefisien variasi produksi padi di Pulau Jawa (kuintal/ha)

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta (kg/ha)	Jawa Barat (kg/ha)	Jawa Tengah (kg/ha)	Jawa Timur (kg/ha)	DI Yogyakarta (kg/ha)	Banten (kg/ha)
2010	5540	5760	5613	5929	5602	5039
2011	5523	5922	5447	5489	5589	4911
2012	5822	5874	5770	6174	6188	5145
2013	5888	5953	5606	5915	5788	5292
2014	5386	5882	5357	5981	5787	5295
Rata-rata	5632	5878	5559	5898	5791	5136
Standar deviasi	2,14	0,73	1,60	2,51	2,42	1,66
Koefisien variasi (%)	3,79	1,25	2,89	4,25	4,18	3,22

Sumber: Analisis statistik perdagangan pada tahun 2010–2014.

terjadi peningkatan luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur 2014).

Menurut Irawan (2004), secara agronomis, peningkatan produktivitas padi dapat terjadi akibat beberapa faktor, antara lain penggunaan varietas berdaya produksi tinggi dan mutu penerapan teknologi usaha tani (kualitas cara bercocok tanam), serta faktor lingkungan di lokasi produksi. Varietas unggul baru merupakan komponen teknologi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan produksi padi. Hingga tahun 2004, Indonesia telah melepas 184 varietas unggul padi, termasuk varietas introduksi dari IRRI. Beberapa provinsi di Pulau Jawa, varietas IR64 masih mendominasi, namun varietas Ciherang pernah menggeser dominasi tersebut, antara lain di Jawa Barat dan Banten (Nurhati *et al.* 2008; Siagian *et al.* 2015). Untuk mendukung ketersediaan benih varietas unggul baru, sejak tahun 2006 BPTP Jawa Barat melakukan kegiatan produksi benih sumber varietas unggul baru untuk digunakan oleh kelompok penangkar (Nurhati *et al.* 2008).

Salah satu ancaman dalam upaya peningkatan produktivitas usaha tani padi ialah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sawah yang subur menjadi ancaman utama penurunan produktivitas padi di Pulau Jawa. Pada tahun 1999–2002, terjadi konversi lahan sawah seluas 141.286 ha/tahun dan sebesar 70,3% terjadi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, di beberapa wilayah pertanian dikatakan memanfaatkan lahan tidur karena lahan petani semakin berkurang karena sebagian besar lahan pertanian sudah menjadi permukiman, perkantoran, hotel, dan bangunan lainnya. Data Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta (2009) menunjukkan terjadi penurunan lahan sawah seluas 1.074 ha pada tahun 2004–2007.

Koefisien variasi paling tinggi terdapat di Jawa Timur, yaitu sebesar 4,25% dan yang paling rendah terdapat di Jawa Barat, yaitu sebesar 1,25%. Koefisien variasi sendiri merupakan hasil perbandingan antara standar deviasi dengan produktivitas rata-rata dikalikan 100% yang mana besarnya menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi. Semakin tinggi koefisien variasi maka semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam usaha tani padi tersebut. Pada tahun 2010–2014, Provinsi Jawa Timur telah menjadi provinsi dengan tingkat produktivitas padi paling tinggi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2010 sebesar 5.929 kg/ha dan pada tahun 2014 sebesar 5981 kg/ha. Sementara itu, rata-rata produktivitas padi di Jawa Timur pada tahun 2010–2014 tersebut adalah yang paling besar di antara kelima provinsi lainnya, yaitu sebesar 5898 kg/ha, namun tingkat produktivitas padi yang tinggi ini tidak menjamin keberlangsungan usaha tani padi di Jawa Timur karena provinsi tersebut memiliki tingkat risiko usaha tani yang paling tinggi, yaitu sebesar 1,25%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2010–2014, Jawa Timur mengalami fluktuasi produktivitas padi yang cukup besar. Berbeda dari di Jawa Barat yang juga menjadi provinsi dengan tingkat produktivitas padi terbesar

sebanyak dua kali pada tahun 2010–2014, yaitu pada tahun 2011 sebesar 5922 kg/ha dan pada tahun 2013 sebesar 5953 kg/ha, namun justru memiliki tingkat risiko usaha tani paling rendah, yaitu sebesar 1,25%. Hal ini terjadi karena, di Jawa Barat produktivitas padi tidak mengalami fluktuasi yang besar.

Dari sudut pandang teknologi produksi, hasil padi yang dicapai petani pada saat ini di beberapa sentra produksi dapat dikatakan sudah mendekati batas atas yang bisa dicapai di lapang. Produktivitas rata-rata usaha tani padi di lahan irigasi di Indonesia mencapai 6,4 ton/ha, tertinggi kedua di Asia Timur dan Tenggara setelah Cina sebesar 7,6 ton/ha (Hossain & Narciso 2002). Potensi peningkatan produktivitas hanya berkisar antara 0,5–1,0 ton/ha, itu pun dengan penambahan input yang lebih mahal. Namun, masih terbuka peluang untuk meningkatkan produksi beras secara nasional melalui peningkatan rendemen (Jamal *et al.* 2008).

### Dinamika HPP Gabah dan HEB di Pulau Jawa

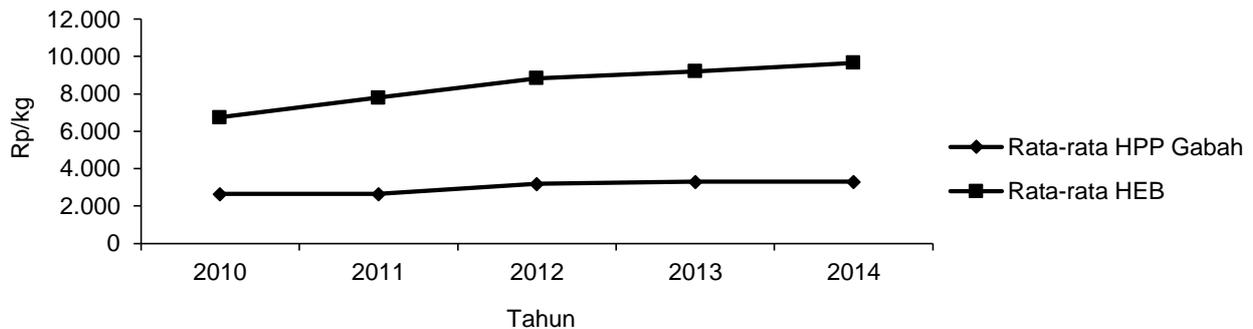
Dalam prinsip ekonomi, harga merupakan variabel yang menentukan kuantitas produk yang ditawarkan. Pemerintah mengintroduksi kebijakan HPP, di mana prinsip kebijakan harga ini ialah sejak awal perencanaan, pemerintah menetapkan sejumlah volume tertentu beras yang akan dibeli pada harga pembelian tertentu, dengan sejumlah anggaran tertentu pula. Tingkat HPP ditetapkan di atas harga pasar dan dihitung dengan mengacu pada prinsip pemberian insentif berproduksi bagi petani padi, sama halnya dengan penentuan harga dasar. Diharapkan HPP gabah dan beras tersebut menjadi referensi bagi pasar beras sehingga harga gabah dan beras dapat terangkat paling tidak mendekati atau menyamai HPP (Suryana *et al.* 2014).

Tabel 4 menunjukkan dinamika HPP gabah dan harga beras di pasar tradisional di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2010–2014 hanya terjadi kenaikan HPP gabah sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada tahun 2012 ketika HPP gabah naik sebesar Rp550 dari yang semula sebesar Rp2640 menjadi Rp3190 atau dapat dikatakan bahwa HPP gabah mengalami pertumbuhan sebesar 20,83% dari tahun sebelumnya. Kenaikan kedua terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 3,45% dari tahun 2012 hingga HPP gabah pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp3300. Peningkatan HPP gabah selalu diikuti oleh peningkatan HEB. Menurut laporan BPS (2014) dalam Suryana *et al.* (2014) bahwa petani mendapat keuntungan yang cukup besar dari usaha tani padi karena harga gabah dan beras di pasar selalu di atas HPP. Lain halnya dengan HEB di pasar tradisional pada tahun 2010–2014, yang selalu mengalami pertumbuhan tiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,53%. Gambar 2 menunjukkan pola pertumbuhan HPP gabah dan HEB di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014.

Tabel 4 Rata-rata pertumbuhan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran beras (HEB)

Tahun	HPP		HEB	
	$\bar{x}$ (Rp/kg)	%	$\bar{x}$ (Rp/kg)	%
2010	2640,00		6739,90	
2011	2640,00	0,00	7801,04	15,74
2012	3190,00	20,83	8834,86	13,25
2013	3300,00	3,45	9209,68	4,24
2014	3300,00	0,00	9660,80	4,90
$\bar{x}$	3014,00	6,07	8449,25	9,53

Sumber: Statistik perdagangan pada tahun 2010–2014.



Sumber: Statistik perdagangan pada tahun 2010–2014.

Gambar 2 Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan harga eceran beras (HEB) di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014.

Dilihat dari pola pertumbuhan HPP gabah dan juga HEB, keduanya sama-sama mengalami pertumbuhan selama tahun 2010–2014, hanya saja pertumbuhan HEB cenderung lebih paralel bila dibandingkan dengan pertumbuhan HPP gabah yang berjalan lebih lambat.

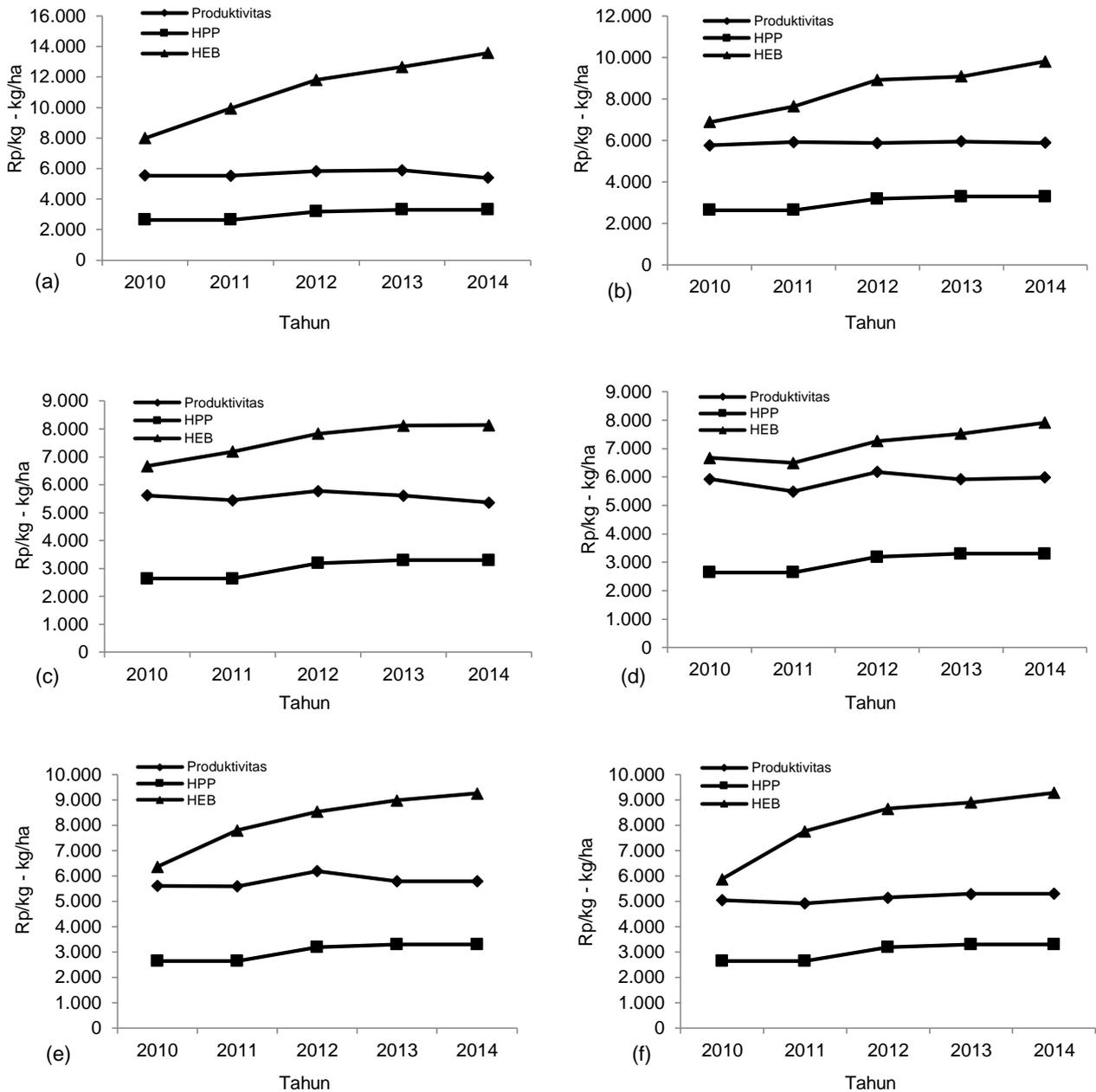
#### Korelasi Produktivitas Padi, HPP Gabah, dan HEB di Pulau Jawa

Gambar 3 menunjukkan pola fluktuasi produktivitas padi, HPP gabah, dan HEB di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014. Gambar 3a–3f menunjukkan pola fluktuasi produktivitas padi, HPP gabah, dan HEB selama tahun 2010–2014 untuk tiap provinsi di Pulau Jawa. Pada tahun 2014, DKI Jakarta justru mengalami penurunan produktivitas padi meskipun HPP yang ditetapkan pemerintah masih sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan HEB di pasar tradisional selalu mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahun (a). Produktivitas padi di Jawa Barat cenderung stabil seiring dengan peningkatan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dan penurunan produktivitas padi sebesar 0,81% (Table 2) hanya terjadi pada tahun 2012, namun penurunan tersebut tidak terlalu tajam, sementara itu HEB justru terus meningkat tiap tahun (b). Provinsi Jawa Tengah, terjadi fluktuasi yang cukup tinggi bahkan sejak tahun 2013–2014 terjadi penurunan produktivitas padi meskipun HPP naik sejak tahun 2012 dan meskipun HEB juga selalu meningkat (c). Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur ketika pada tahun 2011 terjadi penurunan produktivitas padi yang cukup tajam padahal HPP masih sama dengan tahun

sebelumnya, kemudian pada tahun 2013 pada saat HPP naik dari tahun sebelumnya, produktivitas padi justru turun. HEB di pasar tradisional mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2011 yang justru menurun, namun penurunan ini bersamaan dengan penurunan produktivitas padi petani (d). Tidak berbeda dari DIY, pada tahun 2011 terjadi penurunan produktivitas padi yang cukup tajam pada saat HPP stabil dan pada tahun 2013 produktivitas padi kembali menurun bahkan pada saat HPP sudah meningkat, sedangkan HEB selalu meningkat setiap tahun dengan peningkatan yang signifikan (e). Provinsi Banten mengalami hal yang sama dengan kelima provinsi lainnya di mana pada tahun 2011 terjadi penurunan produktivitas padi saat HPP stabil dan HEB justru selalu meningkat setiap tahun (f).

Kajian terhadap kemungkinan penetapan HPP yang berbeda antar-wilayah tentunya dengan mempertimbangkan kesanggupan daerah dalam melakukan penjaminan stabilitas harga dan sangat layak untuk diuji coba pada wilayah yang terbatas. Hasil pengamatan pada wilayah surplus beras menunjukkan, *break even point* (BEP) untuk usaha tani padi sangat bervariasi antar-daerah yang berkisar antara Rp1025,6–1338,7/kg gabah kering panen (GKP). Margin keuntungan yang diperoleh petani dengan memperhitungkan biaya lahan dan tenaga kerja keluarga berkisar antara 18,33–34,58% dari total produksi.

Oleh karena itu, dapat dilihat pola fluktuasi produktivitas padi, HPP gabah, dan HEB di pasar tradisional di setiap provinsi mengalami ketidakselarasan dalam



Sumber: Statistik perdagangan pada tahun 2010–2014.

Gambar 3 Pola fluktuasi produktivitas padi, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, dan Harga Eceran Beras (HEB) di Pulau Jawa. a) DKI Jakarta; b) Jawa Barat; c) Jawa Tengah; d) Jawa Timur; e) DI Yogyakarta; dan f) Banten.

hal kenaikan dan penurunan antara HPP dan produktivitas padi, begitu pula antara produktivitas padi dan HEB. Sementara itu, antara HPP dan HEB cenderung selaras di mana keduanya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan demikian, tidak ada korelasi antara HPP dengan produktivitas padi dan antara produktivitas padi dan HEB di Pulau Jawa, justru HPP dan HEB yang memiliki korelasi.

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis korelasi antara HPP gabah dan HEB di pasar tradisional pada tahun 2010–2014. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa pola fluktuasi (Gambar 3) antara HPP gabah

Tabel 5 Hasil korelasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Beras (HEB)

	Koefesien korelasi	Signifikan
HPP_HEB	0,561	0,001*

Keterangan: \*)Signifikan pada 0,01 (2-tailed).

dan tingkat produktivitas cenderung tidak selaras kenaikan maupun penurunannya. Dapat diartikan bahwa kebijakan HPP oleh pemerintah tidak mendorong perbaikan produktivitas usaha tani padi di Pulau Jawa. Menurut Suryana *et al.* (2014), salah satu faktor kunci yang menghilangkan efektivitas kebijakan

harga ini adalah liberalisasi ekonomi beras dengan membuka kesempatan impor beras kepada swasta.

Peningkatan HPP mengakibatkan harga gabah meningkat sehingga harga beras eceran meningkat walaupun penawaran beras meningkat. Peningkatan harga gabah lebih efektif memengaruhi harga beras eceran dibandingkan dengan peningkatan jumlah penawaran beras. Peningkatan harga beras eceran mengakibatkan permintaan beras menurun (Siswanto *et al.* 2018). Rahim (2010) menyimpulkan bahwa penetapan harga oleh pemerintah berpengaruh pada harga gabah di tingkat petani. Penelitian Sinuraya (2008) menunjukkan bahwa HPP dan harga beras di tingkat konsumen di Sumatera Utara memiliki korelasi positif yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi HPP maka semakin tinggi harga beras. Penelitian Johan (2012) menyimpulkan bahwa produksi beras, impor beras, dan konsumsi beras berpengaruh pada penentuan HPP di Sumatera Utara, sedangkan Prastowo *et al.* (2008) mengemukakan bahwa harga eceran beras memang bergerak selaras dengan pergerakan harga gabah di tingkat petani, yaitu harga eceran beras langsung meningkat ketika harga gabah di tingkat petani meningkat. Sudana (2011) menyebutkan bahwa penerapan kebijakan harga gabah pembelian pemerintah (HPP) pada saat panen cukup efektif di beberapa wilayah dan di wilayah lain tidak efektif. Marjin harga beras lebih menguntungkan penggiling dan pedagang beras sehingga diperlukan regulasi harga yang mampu mendistribusikan marjin tersebut lebih adil dan wajar untuk memastikan bahwa petani sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen beras tidak dirugikan. Saputra *et al.* (2014) menyatakan bahwa hubungan kualitas yang terjadi antara harga pembelian pemerintah (HGKP dan HGKG) dan HEB adalah satu arah, yaitu HEB memengaruhi HGKP dan HGKG.

Pemerintah membuat strategi pembangunan pertanian dengan memilih seperangkat kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan, dengan memperhitungkan kendala-kendala ekonomi yang ada. Beberapa kajian menyimpulkan variabel-variabel yang berpengaruh pada produktivitas padi. Menurut Siswanto *et al.* (2018), kebijakan jaminan harga berupa peningkatan HPP mengakibatkan peningkatan harga gabah pada tingkat petani sehingga menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi padi. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah berupa penetapan HPP belum mampu mendukung tujuan peningkatan produksi beras. Harga pembelian pemerintah maupun harga eceran beras tidak berhubungan secara langsung dengan produktivitas padi karena penetapan harga tersebut tidak berdampak pada keuntungan, sehingga kebijakan harga pemerintah tidak mendorong perbaikan produktivitas usaha tani padi.

Oleh karena itu, analisis korelasi tersebut menghasilkan beberapa simpulan berikut: 1) Kisaran nilai HPP masih di bawah harga pembelian di pasar sehingga tidak menarik petani untuk memperbaiki

capaian produktivitas usaha taninya. Keadaan ini diperkuat oleh data indeks keparahan harga gabah kering panen di tingkat petani maupun harga GKP di tingkat penggilingan yang menunjukkan bahwa GKG ditemukan masih di bawah HPP, terutama pada tahun 2010–2013 (BAPPENAS 2015). 2) Pengaruh faktor lingkungan di lokasi produksi, antara lain iklim yang ekstrem dan serangan organisme pengganggu tanaman, mengurangi keefektifan penerapan HPP dalam upaya meningkatkan produktivitas padi. 3) Perkembangan teknologi berupa peran varietas dan kualitas pemeliharaan berpengaruh pada capaian produktivitas. 4) Faktor eksternal, yakni impor beras menurunkan daya saing produksi padi petani padi di Jawa serta alih fungsi lahan mengurangi efektivitas HPP dan HEB. Menurut penelitian Susila & Sinaga (2016), efektivitas kebijakan harga produksi lebih penting dibandingkan dengan kebijakan harga input, dalam menjaga tingkat keuntungan petani produsen padi, apabila HPP ditentukan secara positif berpihak ke petani produsen.

## KESIMPULAN

Produktivitas padi di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010–2014 cenderung berfluktuasi. Jawa Timur merupakan provinsi dengan rerata produktivitas padi paling tinggi pada tahun 2010–2014 di Pulau Jawa, yaitu sebesar 5898 kg/ha, sedangkan rata-rata produktivitas padi terendah adalah Banten, yaitu sebesar 5136 kg/ha. Jawa Timur sebagai penghasil padi dengan rata-rata tingkat produktivitas tertinggi di Pulau Jawa memiliki rerata pertumbuhan pada tahun 2010–2014 yang terendah, yaitu sebesar 0,49%, sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat rerata pertumbuhan tinggi, yaitu sebesar 1,28%. Penurunan rerata pertumbuhan pada tahun 2010–2014 terjadi di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, yaitu sebesar -1,08–-0,57%.

Rerata pertumbuhan yang relatif rendah di Provinsi Jawa Timur karena tingginya risiko usaha tani, ditunjukkan oleh koefisien variasi yang mencerminkan risiko produksi usaha tani padi di Pulau Jawa paling besar dihadapi oleh Jawa Timur, yaitu sebesar 4,25%, sedangkan risiko paling kecil dihadapi oleh Jawa Barat, yaitu sebesar 1,25% karena memiliki tingkat fluktuasi produktivitas padi paling rendah. Serangan OPT merupakan sumber tingginya risiko usaha tani padi. HPP gabah berkorelasi dengan HEB di pasat tradisional dengan korelasi 0,561.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansoy, Hasan, Zeki B. 2017. Determination of The Effect of Price Fluctuations on Producer Incometha Case of Potatoes. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*. 5(11): 1342–1349.

- Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. 2015. Data Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2014. [internet]. [diunduh 18 Juli 2016]. Tersedia pada: <http://bkp.pertanian.go.id>
- Behrman JR. 1968. Supply Response in Underdeveloped Agriculture. North-Holland (ND).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Produksi Tanaman Pangan, Angka Tetap Tahun 2011 dan Angka Ramalan I Tahun 2012. Juli 2012. Jakarta (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi DIY 2013. Indikator Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2013–2017. Yogyakarta (ID).
- [BPS] Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. Produksi Padi dan Palawija (Angka Sementara Tahun 2013) No. 20/03/35/Th.XII, 3.
- Djojohadikusumo, S. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia. Maret 2014.
- Hermanto, Saptana. 2017. Kebijakan Harga Beras Ditinjau dari Dimensi Penentu Harga. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 35(1): 2017.
- Hossain, Mahabub, Josephine Narciso 2002. Global Rice Market: Trend and Perspectives. *Bangladesh Institute of Development Studies* (BIDS). 28(4): 1–28.
- Irawan B. 2004. Produktivitas Potensial dan Mutu Usahatani Padi Sawah di Jawa: Kecenderungan dan Konsekuensinya terhadap Upaya Peningkatan Produksi Padi. *Icaserd Working Paper*. 31: 1–31.
- Jama, Erizal, Hendiarto, Ening Ariningsih. 2008. Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*. 1(1): 74–81.
- Johan TMI. 2012. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Terhadap Beras di Sumatera Utara. *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*. 2(2).
- Just R. 1974. Investigation of the importance of risk in farmer's decisions', *American Journal of Agricultural Economics* pp. 1425. <https://doi.org/10.2307/1239343>
- Maulana M. 2012. Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan pertanian*. 10(3): 211–223. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n3.2012.211-223>
- Nurhati I, Ramdhaniati S, dan Zuraida N. 2008. Peranan dan Dominasi Varietas Unggul dalam Peningkatan Produksi Padi di Jawa Barat. *Buletin Plasma Nutfah*. 14(1): 8–13. <https://doi.org/10.21082/blpn.v14n1.2008.p8-13>
- Prastowo NJ, Tri Y, Depari Y. 2008. Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya terhadap Inflasi. Working Paper Juni 2008, WP/07/2008. Bank Indonesia.
- Rahim M. 2010. Dampak Kebijakan Harga dan Impor Beras terhadap Nilai Tukar Petani di Pantai Utara Jawa Barat. *Jurnal Trikonomika*. 9(1): 29–36.
- Saputra A, Arifin B, Kasymir E. 2014. Analisis Kausalitas Harga Beras, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Dan Inflasi Serta Efektivitas Kebijakan HPP Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 2(1).
- Sawit MH. 2010. Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Siagian V, Widyastuti D, Setiowati I, Sintawati R. 2015. Kondisi Aktual Usaha tani Padi Sawah di Kabupaten Padeglang, Banten. Dalam: *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. 1(5): 1251–1255. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010550>
- Sinuraya BH. 2008. Analisis Hubungan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dengan Produksi dan Harga Beras di Tingkat Konsumen di Sumatera Utara. [Skripsi]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.
- Siswanto E, Sinaga BM, Harianto. 2018. Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 23(2): 93–100. <https://doi.org/10.18343/23.2.93>
- Sudana W. 2011. Efektivitas Penerapan Kebijakan Harga Eceran tertinggi Urea dan Harga Gabah Pembelian Pemerintah di beberapa Sentra Produksi. *Jurnal Iptek Tanaman Pangan*. 6(1): 30–40.
- Suryana A, Rachman B, Hartono MH. 2014. Dinamika Kebijakan Harga Gabah dan Beras dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*. 7: 155–168.
- Susila, Wayan R, Bonar M. Sinaga. 2016, Analisis Kebijakan Industri Gula Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. 23 (1):30–53.
- Usman H. 2009. *Pengantar Statistik*. Jakarta (ID): Bumi Aksara.